

PENGELOLAAN PROGRAM BANTUAN PERMAKINAN BAGI LANJUT USIA KELUARGA TUNGGAL DI DESA BOJONGKONENG KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

DOI: <https://doi.org/10.31595/lindayasos.v7i1.1538>

Hana Nida Hanifah¹

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Indonesia
hananidahanihah03@gmail.com

Ellya Susilowati²

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Indonesia
ellya.susilowati@poltekesos.ac.id

Rosilawati³

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Indonesia
rosilalawati@gmail.com

Wendy Pradytia

Program Studi Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Indonesia
whendie.pradytia@gmail.com

Journal History

Received: 2024-11-25

Accepted: 2025-06-21

Published: 2025-06-30

ABSTRACT

Single elderly individuals represent a vulnerable group facing physical, economic, and social limitations in meeting their basic needs, including access to nutritious food. The food assistance program organized by the Ministry of Social Affairs through a community-based approach serves as a strategic solution to enhance the welfare of the elderly. This study aims to analyze the management of the food assistance program for single elderly individuals in Bojongkoneng Village, Ngamprah Subdistrict, based on the four management functions by George R. Terry: planning, organizing, actuating, and controlling. The research employs a descriptive qualitative method with data collection techniques including in-depth interviews, observation, and document study involving eight key informants. The findings indicate that the program has been implemented systematically but remains suboptimal and lacks standardization across all managerial aspects. The main issues include the absence of individual assessments, unclear recruitment standards for community groups (Pokmas), lack of technical and occupational safety procedures (SOPs), and a weak monitoring and evaluation system. This study recommends the development of elderly needs assessments, formulation of SOPs, and strengthening of Pokmas institutional capacity and data-based supervision systems to improve the quality and sustainability of elderly food assistance programs.

KEYWORDS: Elderly, food assistance program, social management, community group (Pokmas), management function

ABSTRAK

Lanjut usia keluarga tunggal merupakan kelompok rentan yang menghadapi keterbatasan fisik, ekonomi, dan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar, termasuk pangan bergizi. Program permakanan yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial melalui pendekatan berbasis masyarakat menjadi salah satu solusi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan program permakanan bagi lansia keluarga tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah berdasarkan empat fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap delapan informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan secara sistematis namun belum optimal dan belum terstandarisasi di semua aspek manajemen. Permasalahan utama terletak pada ketiadaan asesmen individual, ketidakjelasan standar rekrutmen Pokmas, ketiadaan SOP teknis dan K3, serta lemahnya sistem monitoring dan evaluasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya asesmen kebutuhan lansia, penyusunan SOP, serta penguatan kelembagaan Pokmas dan sistem pengawasan berbasis

Pengelolaan Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat

data sebagai upaya peningkatan kualitas dan keberlanjutan program permakanan lansia.

Kata Kunci: Lansia, Program Permakanan, Pengelolaan Program, Pokmas, ungsi manajemen

PENDAHULUAN

Proses menjadi tua merupakan fase alami dalam kehidupan manusia. Seiring bertambahnya usia, individu mengalami berbagai penurunan kondisi, baik secara fisik maupun psikologis (Nugroho, 2012; WHO, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2024), jumlah lanjut usia (lansia) di Indonesia mencapai 33,7 juta jiwa atau sekitar 11,8% dari total populasi yang berjumlah 285,6 juta jiwa. Persentase ini menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase *aging population*, yaitu kondisi ketika proporsi lansia melebihi 10% dari total populasi, atau sekitar 1 dari setiap 10 penduduk merupakan lansia (BPS, 2024; HelpAge International, 2013).

Fenomena ini menuntut perhatian khusus, terutama dalam hal perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar lansia, khususnya yang tergolong sebagai keluarga tunggal. Lansia dalam kategori ini berisiko lebih tinggi mengalami permasalahan kesehatan fisik dan psikologis akibat penurunan fungsi tubuh serta minimnya dukungan sosial dan keluarga (BKKB, 2021; ILO, 2017). Oleh karena itu, penting untuk menyediakan perlindungan sosial sebagai upaya pencegahan risiko kesehatan dan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan gizi lansia. Menurut Suharto (2014), "*Perlindungan sosial adalah serangkaian kebijakan yang dirancang untuk mengurangi kemiskinan, kerentanan, dan ketimpangan.*" Program perlindungan sosial memiliki fungsi strategis dalam membantu individu yang berada dalam lingkaran kemiskinan agar dapat keluar dan kembali menjalankan fungsi sosialnya dalam masyarakat.

Perlindungan sosial bagi lansia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan kepada lansia. Undang-undang ini juga menekankan pentingnya peran keluarga, masyarakat, dan pemerintah dalam memberikan penghormatan, perlakuan yang adil, serta pengakuan atas keberadaan lansia, sehingga mereka dapat menikmati kualitas hidup yang layak (Kemensos RI, 2022).

Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi. Berdasarkan data BPS (2022), jumlah penduduk di wilayah ini mencapai 1.846.969 jiwa pada tahun 2023. Laporan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat (2023) mencatat bahwa jumlah lansia mencapai 8,25% dari total penduduk atau sebanyak 157.464 orang. Kecamatan Ngamprah tercatat sebagai wilayah dengan jumlah lansia terbanyak ketiga dari 16 kecamatan, dengan jumlah lansia keluarga tunggal sebanyak 2.147 orang. Lansia keluarga tunggal didefinisikan sebagai individu berusia lanjut (70 tahun ke atas) yang hidup sendiri, berada dalam kondisi miskin, terlanjar, dan tidak memiliki dukungan dari tetangga, kerabat, maupun keluarga (Keputusan Dirjen Rehabilitasi Sosial No. 203/4/HK.01/01/2024). Kondisi ini menyebabkan banyak lansia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara mandiri, khususnya dalam hal pemenuhan nutrisi yang memadai (Kemenkes RI, 2021; Wibowo & Irawati, 2020). Meskipun Kementerian Sosial telah menyampaikan informasi mengenai Program Bantuan Permakanan bagi Lansia Keluarga Tunggal kepada Dinas Sosial di berbagai wilayah, pelaksanaan program ini belum merata. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan program, baik dari segi sumber daya maupun kapasitas manajemen (Kemensos RI, 2022; ILO, 2017).

Program Permakanan Lanjut Usia merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial konkret, dengan menyediakan makanan siap saji dua kali sehari. Paket makanan ini terdiri dari nasi, lauk pauk (hewani/nabati), sayuran, buah potong, dan air mineral. Program ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar nutrisi, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan kualitas hidup lansia (WHO, 2015). Di samping itu, program ini juga mendorong solidaritas sosial dan gotong royong melalui pelibatan Kelompok Masyarakat (Pokmas) dalam pelaksanaannya (Amalia et al., 2021; Soelton et al., 2021; Susilowati, 2018a, 2018b).

Berbagai studi sebelumnya telah mengevaluasi kualitas layanan Program Permakanan. Penelitian oleh Purba et al. (2020) menyoroti pentingnya penyesuaian menu dengan kondisi kesehatan lansia untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Sementara itu, Septiana (2023) menekankan tantangan dalam implementasi program, seperti kurangnya koordinasi antarlembaga dan ketidaktepatan sasaran penerima manfaat. Sebaliknya, Haryani (2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan program di beberapa wilayah telah berjalan baik, tepat sasaran, dan memberikan dampak positif terhadap pemenuhan nutrisi lansia. Kecamatan Ngamprah di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu wilayah yang telah melaksanakan Program Permakanan sejak awal peluncurannya pada tahun 2022 hingga kini (2025). Kecamatan ini bahkan menjadi percontohan dalam pengelolaan program bagi kecamatan lain di wilayah tersebut. Namun demikian, pengelolaan program oleh Pokmas di Kecamatan Ngamprah masih belum sepenuhnya optimal, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut (Susilowati, 2013).

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang menitikberatkan pada pengelolaan program berdasarkan teori George R. Terry dalam bukunya *Human Service Organization Management* (2009), yang menyatakan bahwa "pengelolaan program adalah suatu proses khas yang terdiri atas tindakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian untuk menentukan serta mencapai tujuan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya." Dalam konteks ini, prinsip-prinsip

manajemen program perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) menjadi fokus utama yang belum banyak dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Dengan memperhatikan temuan dari studi terdahulu serta keunikan fokus penelitian ini, peneliti terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam mengenai **“Pengelolaan Program Bantuan Permakanaan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.”**

LITERATUR

Kajian literatur ini bertujuan untuk memberikan landasan teoritis dan empiris mengenai pengelolaan program bantuan permakanaan bagi lanjut usia keluarga tunggal.

1. Konsep Pengelolaan Program Sosial

Pengelolaan program merupakan aspek fundamental dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan sosial, termasuk program bantuan permakanaan bagi lanjut usia. Pengelolaan secara umum mencakup serangkaian proses yang terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*) terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pelaksana program (Terry, 2009). Terry menekankan bahwa manajemen adalah suatu proses dinamis yang berfungsi mengarahkan kelompok dalam mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif. Selain pendekatan klasik dari Terry, teori pengelolaan program juga dapat diperkuat melalui perspektif dari Gulick dan Urwick yang dikenal dengan konsep POSDCORB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, and Budgeting). Pendekatan ini menekankan pentingnya fungsi-fungsi administratif dalam organisasi publik dan sangat relevan dalam konteks pelaksanaan program sosial berbasis pemerintah (Gulick & Urwick, 1937). Mintzberg (1994) juga mengemukakan bahwa keberhasilan pengelolaan program sangat dipengaruhi oleh peran manajerial yang fleksibel dan adaptif terhadap konteks sosial yang berubah. Dalam hal ini, pengelola program harus mampu membaca dinamika masyarakat dan merancang strategi pelaksanaan program yang responsif terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan lokal.

2. Program Permakanaan Lanjut Usia

Program Permakanaan bagi Lanjut Usia merupakan salah satu program strategis dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dalam rangka memberikan jaminan kelangsungan hidup bagi lansia yang masuk kategori rentan, khususnya lansia keluarga tunggal. Program ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pangan dan gizi melalui pemberian makanan siap saji sebanyak dua kali dalam sehari secara teratur (Kemensos RI, 2022). Kandungan makanan yang diberikan telah disesuaikan dengan kebutuhan gizi lansia, mencakup nasi, lauk pauk hewani atau nabati, sayuran, buah potong, dan air mineral (Kemensos RI, 2021). Lansia keluarga tunggal didefinisikan sebagai individu berusia lanjut (minimal 70 tahun) yang hidup sendiri, tidak memiliki pasangan, anak, atau anggota keluarga lain dalam satu rumah tangga, dan tergolong miskin atau terlantar (Keputusan Dirjen Rehsos No. 203/4/HK.01/01/2024). Kelompok ini memiliki tingkat kerentanan lebih tinggi terhadap malnutrisi, isolasi sosial, dan penurunan kualitas hidup secara menyeluruh (HelpAge International, 2013; BKKBN, 2021).

3. Studi Empiris Terkait Pengelolaan Program Permakanaan

Berbagai penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa kualitas pengelolaan program sangat memengaruhi keberhasilan pelaksanaan di tingkat akar rumput. Studi oleh Purba et al. (2020) menunjukkan bahwa program permakanaan yang dirancang dengan perencanaan yang matang dan pelibatan lintas sektor dapat meningkatkan kepatuhan konsumsi makanan oleh lansia serta berdampak positif terhadap kesehatan mereka. Namun, tantangan tetap ditemukan, terutama dalam aspek pengorganisasian dan distribusi. Septiana (2023) mencatat bahwa beberapa hambatan dalam pelaksanaan program permakanaan antara lain adalah komunikasi antarorganisasi yang tidak efektif, ketidaktepatan sasaran, dan keterbatasan kapasitas Pokmas. Sebaliknya, hasil penelitian Haryani (2024) mengungkapkan bahwa pada wilayah yang telah menjalankan program permakanaan dengan prinsip manajemen yang sistematis, pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik dan berdampak positif terhadap peningkatan kualitas hidup lansia. Studi terbaru di Kecamatan Paseh (2025) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi program permakanaan ditentukan oleh kejelasan tujuan, alokasi anggaran yang transparan, serta kolaborasi lintas sektor antara Kemensos, Dinas Sosial, dan Pokmas. Penelitian tersebut menggunakan kerangka teori Meter dan Horn, yang menyoroti pentingnya disposisi pelaksana dan kondisi lingkungan implementasi sebagai faktor penentu keberhasilan kebijakan (Rohimat, 2025). Evaluasi serupa juga dilakukan di Kecamatan Pakal, Surabaya, dengan menggunakan indikator evaluasi kebijakan dari Dunn (2018) seperti efektivitas, efisiensi, pemerataan, dan ketepatan sasaran. Hasilnya menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga dan pendampingan posyandu berkontribusi besar terhadap kelancaran program (Wulandari, 2023). Penelitian lain di Kecamatan Pabuaran (2025) mengidentifikasi kendala dalam jumlah SDM dan kapasitas anggaran, namun menguatkan bahwa identifikasi berbasis DTKS dan pengawasan Pokmas efektif mendukung ketepatan sasaran dan kontinuitas distribusi makanan (Rahmawati, 2025).

4. Relevansi Teoritis dan Konteks Lokal

Desa Bojongkoneng di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, merupakan salah satu wilayah yang telah menjadi penerima manfaat Program Permakanaan sejak tahun 2022 hingga 2025. Desa ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena termasuk dalam daerah percontohan dengan pengelolaan yang cukup aktif oleh Pokmas. Studi terhadap pengelolaan program di desa ini dapat memberikan gambaran konkret tentang bagaimana prinsip manajemen program sosial diterapkan dalam konteks lokal dan bagaimana pendekatan ini berkontribusi terhadap efektivitas pemenuhan kebutuhan dasar lansia.

METODELOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk menggali secara mendalam dinamika pengelolaan program permakanaan bagi lansia keluarga tunggal. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman menyeluruh tentang konteks sosial, aktor yang terlibat, serta proses pelaksanaan program (Creswell, 2016). Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup empat tahap yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini dipilih karena mampu mengorganisasi data kualitatif secara sistematis dan mendalam.

Keabsahan data diuji dengan teknik triangulasi yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Patton, 2002). Tujuannya adalah untuk memastikan validitas data dan meningkatkan kredibilitas hasil penelitian. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: (1) petugas yang terlibat langsung dalam program permakanaan bagi lansia keluarga tunggal; (2) memahami petunjuk teknis pelaksanaan program; (3) mampu memberikan informasi yang relevan dan mendalam terkait pelaksanaan program; dan (4) untuk informan lansia, bersedia diwawancarai dan berada dalam kondisi tidak *bedridden*. Total terdapat delapan (8) informan yang terdiri dari: satu (1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, satu (1) Staf Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), dua (2) pengurus Pokmas (ketua dan bagian distribusi), satu (1) Koordinator PKH Kecamatan Ngamprah, satu (1) Koordinator Ahli Gizi dari Puskesmas Kecamatan Ngamprah, serta dua (2) lansia keluarga tunggal sebagai penerima bantuan. Lokasi penelitian dipilih secara purposif yaitu di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil survei pendahuluan yang menunjukkan bahwa desa ini telah aktif menjalankan program permakanaan sejak 2022, memiliki jumlah penerima yang representatif, serta mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk kecamatan, Pokmas, dan lansia penerima bantuan. Dengan demikian, Desa Bojongkoneng dinilai layak untuk menjadi lokasi penelitian guna menggambarkan praktik pengelolaan program secara komprehensif.

DISKUSI DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian tentang pengelolaan program permakanaan bagi lansia terlantar dilihat dari aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Perencanaan (*Planning*)

Program permakanaan bagi lansia terlantar, khususnya lansia yang hidup sebagai keluarga tunggal di Kecamatan Ngamprah, dirancang melalui perencanaan yang sistematis dan kolaboratif. Perencanaan ini dilakukan dalam empat kali pertemuan selama dua minggu pada November 2022, bertempat di Kantor Kecamatan Ngamprah. Perencanaan melibatkan unsur pemerintah kecamatan, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), dan tenaga ahli gizi dari Puskesmas setempat. Perencanaan ini terdiri dari empat tahapan utama:

a. Pertemuan Awal (Sosialisasi Program)

Langkah awal dalam perencanaan program adalah pelaksanaan sosialisasi yang dipimpin oleh Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman awal kepada seluruh kecamatan, sekaligus mengonfirmasi kesiapan mereka dalam mengelola program. Sosialisasi dilaksanakan dengan menghadirkan perwakilan dari seluruh kecamatan di wilayah tersebut. Informan T menyampaikan bahwa pertemuan ini menjadi forum untuk menyampaikan informasi program secara menyeluruh, dan kecamatan diminta menyatakan kesanggupan melalui surat pernyataan resmi. Ini menandakan bahwa proses sosialisasi digunakan sebagai alat komitmen awal. Hal ini diperkuat oleh Informan Y, yang menyatakan bahwa setelah menerima sosialisasi, Kecamatan Ngamprah menyanggupi untuk menjalankan program permakanaan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa proses perencanaan diawali dengan komunikasi yang terbuka dan partisipatif, sehingga semua unsur yang terlibat memahami peran dan tanggung jawabnya sejak awal. Sosialisasi juga menjadi wahana untuk menyamakan persepsi dan merancang strategi pelaksanaan berbasis kesiapan daerah.

b. Penetapan Tujuan Program

Tujuan program permakanan lansia ditetapkan secara jelas dengan mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024, yang menekankan pentingnya pemenuhan hak dasar lansia terutama bagi mereka yang hidup sendiri dan rentan. Informan T menegaskan bahwa tujuan program menjadi dasar dalam pelaksanaan agar tetap selaras dengan arah kebijakan nasional, terutama untuk menjamin pemenuhan hak pangan bagi lansia terlantar. Informan Y menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk penghormatan pemerintah terhadap kelompok lansia sebagai bagian dari mandat perlindungan sosial. Informan L, sebagai pendamping PKH, menjelaskan bahwa tujuan program juga berkaitan dengan validasi dan verifikasi data secara langsung di lapangan, agar bantuan tepat sasaran. Tujuan teknis ini mengintegrasikan pendekatan administratif dengan pendekatan sosial. Dari sisi kesehatan, Informan F sebagai ahli gizi menyampaikan bahwa program ini mendukung prinsip intervensi gizi yang bertujuan mencegah malnutrisi dan risiko kesehatan kronis pada lansia. Dengan demikian, perencanaan tujuan mencakup tiga aspek penting: (1) pemenuhan hak dasar, (2) perlindungan sosial, dan (3) intervensi kesehatan.

c. Penetapan Sasaran Program

Penetapan sasaran merupakan elemen penting agar bantuan permakanan diberikan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan juknis. Sasaran utama program adalah lansia keluarga tunggal, yakni lansia yang tercatat dalam Kartu Keluarga sebagai satu-satunya anggota dan terdaftar dalam DTKS atau kini DTSEN. Informan Y menegaskan bahwa sasaran diprioritaskan kepada lansia tunggal yang tidak menerima bantuan sosial lainnya seperti PKH dan BPNT. Informan L memperjelas bahwa sasaran lebih difokuskan pada lansia berusia di atas 80 tahun, yang bukan merupakan bagian dari keluarga ASN/PNS atau pensiunan, guna menghindari tumpang tindih bantuan dan memastikan keberpihakan pada yang benar-benar membutuhkan. Dengan mekanisme seleksi yang berbasis data serta adanya verifikasi oleh pendamping sosial, maka penetapan sasaran dapat dipastikan akuntabel dan responsif terhadap kelompok lansia yang paling rentan.

d. Penetapan Waktu Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan program disusun secara terstruktur dengan memperhatikan aspek kebutuhan gizi lansia dan logistik distribusi. Jadwal penyaluran ditetapkan dua kali dalam sehari, yakni pukul 06.00 pagi dan pukul 13.00 siang. Penyaluran dirancang agar tidak lebih dari tiga jam setelah makanan disiapkan. Informan Y menyampaikan bahwa penjadwalan ini diatur untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga dan dapat diterima dalam kondisi layak konsumsi. Selain itu, Informan F menambahkan bahwa menu makanan dirancang berganti setiap 10 hari, agar variasi nutrisi tetap terjaga dan lansia tidak mengalami kebosanan dalam mengonsumsi makanan harian. Perencanaan waktu ini memperlihatkan bahwa aspek logistik dan gizi menjadi pertimbangan penting dalam desain waktu pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa program permakanan tidak hanya mempertimbangkan aspek sosial, tetapi juga mempertimbangkan kesehatan dan psikologi lansia sebagai penerima manfaat.

Berdasarkan hasil penelitian dan informasi yang dihimpun dari sebagian informan (T, Y, L, dan F), dapat disimpulkan bahwa perencanaan program permakanan bagi lansia terlantar di Kecamatan Ngamprah telah dilakukan secara komprehensif dan berbasis kolaboratif. Perencanaan mencakup langkah awal berupa sosialisasi, penetapan tujuan yang berlandaskan regulasi dan kebutuhan lansia, penetapan sasaran berdasarkan kriteria ketat dan verifikasi lapangan, serta penjadwalan waktu distribusi yang memperhatikan faktor gizi dan keberagaman menu. Dengan menggabungkan data administratif, pendekatan sosial, serta pertimbangan kesehatan, perencanaan program ini mampu menjadi dasar yang kuat untuk pelaksanaan yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian dalam program permakanan bagi lansia terlantar di Kecamatan Ngamprah mencerminkan proses manajerial yang mengatur sumber daya manusia, struktur kerja, dan komunikasi antar pihak secara efektif dan efisien. Pengorganisasian ini terdiri atas tiga elemen utama:

a. Penetapan Struktur Organisasi

Struktur organisasi program permakanan ditetapkan secara formal melalui Surat Keputusan (SK) dari pihak Kecamatan. Struktur inti terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, sedangkan keanggotaan lainnya berasal dari warga asli Kecamatan Ngamprah yang dikelompokkan ke dalam divisi-divisi sesuai kebutuhan, seperti divisi dapur, pengemasan makanan, dan kurir. Menurut Informan Y, keanggotaan Pokmas direkrut dari masyarakat setempat berdasarkan kemampuan dan komitmen sosial, bukan melalui seleksi administratif yang ketat. Ia menekankan bahwa karena keterbatasan anggaran, para pengurus bekerja secara sukarela tanpa honor tetap, sehingga diperlukan jiwa sosial dan hati yang tulus. Hal senada diungkapkan oleh Informan E, bahwa keanggotaan Pokmas didominasi oleh buruh harian lepas yang tidak terikat pekerjaan lain, serta memiliki waktu dan komitmen untuk berkontribusi penuh. Pernyataan kedua informan ini menunjukkan bahwa meskipun tidak formal secara legal-administratif, struktur organisasi program

terbentuk dengan dasar partisipasi komunitas dan tanggung jawab moral, yang memperkuat keberlangsungan dan rasa memiliki terhadap program.

b. **Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab**

Pembagian tugas dalam organisasi dilakukan secara jelas dan fungsional. Informan E menjelaskan bahwa Ketua Pokmas bertanggung jawab atas keselamatan kerja dan pemantauan anggota, sedangkan anggota Pokmas menjalankan tugas sesuai divisi masing-masing: memasak, mengemas, dan mengantarkan makanan tepat waktu. Pengantaran harus dilakukan maksimal 3 jam setelah makanan siap, untuk menjaga kualitas makanan dan ketepatan waktu pelaporan ke dalam sistem SIKS-MA. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya sebatas teknis operasional, tetapi juga mencakup aspek pelaporan administratif yang terintegrasi dalam sistem informasi sosial nasional. Sementara itu, Informan Y menambahkan bahwa pihak Kecamatan memiliki tanggung jawab dalam bentuk pembinaan kegiatan, evaluasi pelaksanaan program, dan verifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan. Dengan demikian, pembagian tugas mengalir secara hierarkis dan saling terhubung antar aktor program dari tingkat kecamatan hingga pelaksana lapangan.

c. **Komunikasi Antar Stakeholder**

Komunikasi antar stakeholder dalam program permakanaan ini dinilai berjalan dengan efektif dan efisien, sebagaimana dijelaskan oleh Informan Y. Komunikasi dilakukan melalui grup pesan singkat yang menghubungkan Dinas Sosial, Kecamatan, dan Pokmas, sehingga proses koordinasi dapat berlangsung secara real time. Hal ini mempercepat penyelesaian kendala yang muncul dalam pelaksanaan, terutama dalam distribusi makanan dan pelaporan kegiatan. Informan E juga menyatakan bahwa grup komunikasi internal memudahkan setiap anggota untuk segera melaporkan kendala atau insiden, dan penyelesaiannya bisa dilakukan di hari yang sama jika memungkinkan. Hal ini menunjukkan adanya budaya komunikasi terbuka dan kolaboratif, yang tidak hanya mencegah miskomunikasi tetapi juga membangun rasa saling percaya dan solidaritas antarpihak. Namun, temuan penelitian juga mencatat adanya ketimpangan dalam perlindungan kerja, seperti belum adanya jaminan keselamatan kerja bagi kurir makanan, meskipun mereka terlibat dalam aktivitas mobilitas harian yang berisiko.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengorganisasian program permakanaan bagi lansia di Kecamatan Ngamprah telah dilakukan secara partisipatif, fungsional, dan adaptif, meskipun dilaksanakan dalam keterbatasan anggaran dan sumber daya. Struktur organisasi dibentuk melalui SK formal namun dijalankan dengan semangat sukarelawan berbasis komunitas. Pembagian tugas dilakukan secara proporsional berdasarkan fungsi, dan komunikasi antarpihak terbangun secara aktif melalui jalur informal yang terkoordinasi dengan baik. Data dari Informan Y dan E memperkuat bahwa keberhasilan pengorganisasian program ini tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga oleh nilai-nilai sosial seperti komitmen, ketulusan, dan komunikasi yang terbuka, yang menjadi fondasi pelaksanaan program secara berkelanjutan.

3. **Pelaksanaan (Actuating)**

Tahap pelaksanaan merupakan proses realisasi dari seluruh rencana yang telah dirancang dalam program permakanaan lansia. Kegiatan ini melibatkan eksekusi distribusi bantuan makanan kepada sasaran penerima serta pelibatan langsung petugas lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan E dan D, aspek pelaksanaan dalam program ini terbagi ke dalam dua subbagian utama:

a. **Distribusi Bantuan**

- 1) **Jadwal dan Biaya Pelaksanaan.** Pelaksanaan program permakanaan mengikuti jadwal distribusi makanan yang telah ditentukan secara sistematis. Informan E menyatakan bahwa bantuan makanan diberikan dua kali sehari, yaitu pagi pukul 06.00 dan siang pukul 13.00, dengan variasi menu yang disusun dalam siklus 10 hari agar lansia tidak merasa bosan. Total biaya permakanaan sebesar Rp 30.000 per hari per lansia, terdiri dari Rp 15.000 per porsi makanan. Kurir yang bertugas mendapatkan upah Rp 2.000 per pengantaran per lansia. Pada bulan puasa, menurut Informan D, waktu pengantaran disesuaikan menjadi satu kali saja pada pukul 14.30, tetapi langsung mencakup dua porsi untuk berbuka dan sahur. Durasi pengantaran untuk sekitar 13 lansia membutuhkan waktu sekitar dua jam. Hal ini menunjukkan bahwa program berjalan terjadwal, efisien, dan fleksibel sesuai kebutuhan, dengan dukungan SDM yang memiliki komitmen tinggi terhadap waktu dan kualitas pelayanan.
- 2) **Mekanisme Pelaksanaan Teknis.** Distribusi bantuan dilakukan dengan prosedur teknis yang terstruktur. Menurut Informan E, pelaksanaan dimulai dengan penarikan dana dari kantor pos, dilanjutkan dengan pembelian bahan pokok, pengolahan oleh tim dapur, pengemasan oleh tim packing, dan akhirnya pengantaran oleh kurir. Layanan ini juga mencakup dukungan kesehatan tambahan, seperti pemberian obat-obatan ringan bagi lansia. Informan D menambahkan bahwa rute distribusi telah dipetakan sebelumnya pada tahap perencanaan, sehingga kurir memiliki panduan lokasi dan jalur strategis, termasuk untuk wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Dari data tersebut, pelaksanaan program dapat dikatakan berjalan efektif dan

adaptif, dengan memperhatikan aspek logistik, kesehatan penerima, serta fleksibilitas rute distribusi.

b. Petugas Distribusi

- 1) Dukungan Sarana. Distribusi bantuan dilakukan oleh lima orang kurir dari Pokmas Medali yang bertugas secara bergilir. Berdasarkan penuturan Informan D, para kurir menggunakan kendaraan pribadi (sepeda motor) dengan perlengkapan berkendara seperti helm. Meskipun tidak difasilitasi oleh pemerintah secara langsung, mereka tetap menjalankan tugas dengan tanggung jawab dan inisiatif sendiri. Informan E, selaku Ketua Pokmas, menyebutkan bahwa sarana dapur dan peralatan pokok seperti penyimpanan makanan sudah terpenuhi. Selain itu, Pokmas memiliki rompi khusus yang menjadi ciri khas petugas, sehingga membedakan mereka dari kurir jasa komersial dan memudahkan lansia mengenali petugas resmi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun fasilitas terbatas, Pokmas telah berupaya menciptakan identitas profesional dan efisiensi kerja dalam pelaksanaan distribusi.
- 2) Hambatan di Lapangan. Meskipun pelaksanaan berjalan dengan baik, para petugas distribusi menghadapi beberapa hambatan serius di lapangan. Informan E mengungkapkan adanya risiko kecelakaan kerja, seperti ban bocor, rem blong, dan jalan terjal. Belum tersedianya jaminan keselamatan kerja dari pemerintah menjadi sorotan penting, sebab bila terjadi insiden, tanggung jawab ditanggung langsung oleh Ketua Pokmas. Informan D menambahkan bahwa kondisi cuaca ekstrem seperti hujan dan medan jalan di beberapa daerah seperti Pasirkuntul, Cihampelas, Salem, dan Lebakgede yang rusak dan berlumpur menghambat pengantaran, bahkan menyebabkan keterlambatan dan risiko tergelincir. Selain itu, akses jaringan internet untuk pelaporan dan komunikasi di daerah pelosok juga sering terhambat, mengganggu dokumentasi kegiatan melalui sistem SIKS-MA. Ketiadaan perlindungan kerja menjadi tantangan serius yang berisiko mengurangi keselamatan dan motivasi kerja petugas, padahal mereka berperan krusial dalam keberhasilan implementasi program.

Aspek pelaksanaan Program Permakanan Bagi Lansia di Desa Bojongkoneng berjalan efektif, terstruktur, dan responsif terhadap kebutuhan penerima, dengan pelibatan petugas distribusi yang bekerja secara penuh tanggung jawab. Jadwal dan mekanisme distribusi dilaksanakan sesuai perencanaan dan disesuaikan dengan situasi khusus seperti bulan puasa. Namun, dukungan terhadap petugas distribusi masih minim, terutama terkait sarana operasional dan jaminan keselamatan kerja. Meskipun petugas telah berupaya menjalankan tugas secara optimal menggunakan sumber daya pribadi, risiko lapangan tetap tinggi dan perlu segera mendapat perhatian dari Kementerian Sosial. Temuan dari Informan E dan D memperlihatkan bahwa komitmen kuat petugas lapangan menjadi penopang utama kesuksesan program, namun akan lebih optimal jika didukung dengan kebijakan perlindungan dan dukungan logistik yang memadai.

4. **Pengendalian (Controlling)**

Pengendalian (Controlling) merupakan tahapan penting dalam pengelolaan program yang mencakup pemantauan, evaluasi, serta penyesuaian terhadap pelaksanaan kegiatan, guna memastikan bahwa program berjalan sesuai tujuan dan sasaran. Dalam penelitian ini, proses controlling dilakukan melalui monitoring dan evaluasi (monev) oleh beberapa pihak pelaksana dengan pendekatan yang fleksibel dan tidak formal, serta bertujuan untuk menjaga akuntabilitas dan kualitas layanan kepada lansia penerima manfaat.

- a. Monitoring dan Evaluasi. Proses monitoring dan evaluasi dalam program permakanan lansia di Kecamatan Ngamprah dilakukan secara langsung maupun tidak langsung untuk memastikan ketepatan sasaran, kesesuaian pelaksanaan, serta mutu layanan. Informan Y menyatakan bahwa monitoring difokuskan pada ketepatan penerima manfaat, terutama memastikan bahwa lansia yang dibantu masih layak menerima, termasuk memastikan keberadaan fisik lansia (masih hidup). Monitoring dilakukan melalui kunjungan langsung ke dapur Pokmas atau melalui koordinasi dengan ketua Pokmas, dan dokumentasi dilakukan dalam bentuk laporan tahunan, meskipun belum tersedia mekanisme formal atau format evaluasi standar. Informan F menambahkan bahwa evaluasi juga mencakup aspek teknis seperti jenis makanan, penyimpanan, penggunaan APD oleh petugas dapur, dan kualitas bumbu yang sesuai dengan kebutuhan lansia. Namun, evaluasi bersifat lisan dan tidak terdokumentasi secara sistematis, meskipun saran-saran perbaikan dicatat oleh pihak Pokmas.
- b. Manfaat dan Dampak Program. Hasil controlling juga menunjukkan manfaat nyata yang dirasakan langsung oleh penerima bantuan. Berdasarkan wawancara dengan Informan I dan O yang merupakan lansia penerima manfaat, program ini sangat membantu dalam pemenuhan kebutuhan gizi dan pangan, sekaligus meringankan beban ekonomi. Lansia merasa terbantu karena makanan yang diberikan bergizi dan sesuai selera, serta mereka tidak perlu lagi membeli bahan makanan sendiri, yang menjadi beban tambahan di tengah keterbatasan ekonomi.

- c. Kualitas Layanan dan Dukungan Sosial. Selain manfaat fisik, controlling juga mengungkap adanya dukungan sosial dan emosional dari petugas pengantar makanan. Informan I dan O menyampaikan bahwa kurir, khususnya Pak Didin, menunjukkan perhatian dan keramahan dalam interaksi sehari-hari. Kurir tidak hanya mengantarkan makanan, tetapi juga memberikan dukungan moral, bertanya tentang kondisi kesehatan, dan menjaga hubungan baik dengan lansia. Ketepatan waktu dalam pengantaran serta kejujuran kurir ketika terjadi keterlambatan juga menjadi indikator layanan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial dari program ini sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis lansia.

Harapan dan Saran Penerima Manfaat. Dalam proses evaluasi, beberapa saran dan harapan juga disampaikan oleh penerima manfaat. Informan I berharap agar program ini dilanjutkan secara berkesinambungan karena mereka merasa diperhatikan dan memiliki pola makan yang lebih teratur. Mereka juga mengusulkan agar kurir memberikan penjelasan tentang menu makanan, terutama saat ada menu baru yang rasanya asing bagi lansia, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan mencegah makanan terbuang sia-sia. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan komunikasi dan edukasi sederhana antara kurir dan penerima manfaat.

- a. Waktu Pelaksanaan Controlling. Controlling dilakukan secara harian dan insidental, disesuaikan dengan kondisi lapangan. Informan Y menyatakan bahwa monitoring harian dilakukan melalui media WhatsApp, sedangkan monitoring langsung ke lapangan dilakukan secara tentatif. Evaluasi berskala lebih besar dilakukan secara triwulanan dan tahunan. Informan F, sebagai ahli gizi, lebih aktif di awal pelaksanaan program untuk memastikan menu yang dirancang dapat diterima dan aman dikonsumsi oleh lansia, serta melakukan kunjungan jika diperlukan oleh tim dapur. Informan L, sebagai pendamping PKH, melakukan monitoring saat terdapat perubahan data lansia seperti kematian, ketidaksesuaian, atau peralihan bantuan.
- b. Pihak yang Terlibat dalam Pengendalian. Berdasarkan temuan dari Informan Y, L, dan T, pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mencakup: Dinas Sosial, Pihak Kecamatan, termasuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pendamping PKH, Ahli Gizi. Keempat unsur ini memiliki peran masing-masing dalam memantau pelaksanaan dan memberi masukan terhadap perbaikan program. Hal ini menunjukkan adanya koordinasi multipihak, meskipun belum sepenuhnya didukung dengan sistem dan alat evaluasi formal.
- c. Metode Pengendalian. Metode controlling yang digunakan dalam program ini masih bersifat informal dan tidak terdokumentasi secara baku. Informan T mengakui bahwa tidak ada instrumen atau indikator khusus yang dijadikan acuan dalam proses controlling. Pemantauan dilakukan melalui komunikasi langsung, baik online maupun kunjungan lapangan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Informan F yang menyebutkan bahwa monitoring dilakukan berdasarkan laporan Pokmas dan pengamatan langsung tanpa indikator khusus. Namun, Informan Y menjelaskan bahwa controlling juga dilakukan melalui rapat internal, penilaian kinerja Pokmas, standarisasi petugas, dan peningkatan SDM, dengan harapan Pokmas Kecamatan Ngamprah dapat menjadi model bagi kecamatan lain. Upaya ini menunjukkan adanya orientasi jangka panjang untuk membangun sistem yang lebih tertata.

Aspek controlling dalam program permakanan lansia di Kecamatan Ngamprah telah dilaksanakan secara fungsional melalui monitoring dan evaluasi informal, baik oleh aparat pemerintah maupun petugas teknis. Proses ini berfokus pada ketepatan sasaran, kualitas layanan, dan tanggapan langsung terhadap dinamika lapangan. Data dari sebagian informan seperti Y, F, I, O, L, dan T menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan lansia, baik secara fisik maupun psikososial. Namun demikian, controlling belum dilengkapi dengan instrumen formal, indikator evaluasi yang baku, maupun standar pelaporan sistematis, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk membangun mekanisme evaluasi berbasis data yang konsisten agar keberlangsungan dan kualitas program dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan (Haecal, 2023; Haecal & Rusmana, 2022a, 2022b; Izzan & Haecal, 2024; Mohammad Irfan Farraz Haecal, 2022).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan program permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal di Desa Bojongkoneng telah dilaksanakan dengan mengacu pada empat fungsi manajemen George R. Terry, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian, namun belum berjalan secara optimal dan terstandarisasi, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengendalian (Terry, 2009).

Pada aspek **perencanaan (planning)**, program telah dirancang secara sistematis dan melibatkan pihak-pihak terkait seperti Dinas Sosial, PKH, Puskesmas, dan pemerintah kecamatan. Perencanaan dilakukan melalui pertemuan awal, penetapan tujuan program berdasarkan Keputusan Dirjen Rehabilitasi Sosial Nomor 168/4/HK.01/11/2024, serta penentuan sasaran dan waktu pelaksanaan. Namun, ditemukan kelemahan penting yakni tidak dilakukannya asesmen kebutuhan lansia secara individual, yang menyebabkan pemberian menu permakanan disamaratakan tanpa memperhatikan kondisi kesehatan dan usia yang bervariasi. Hal ini bertentangan dengan prinsip pemberian makan lansia

sebagaimana dijelaskan oleh Ma'arifatul (2011) yang menyatakan bahwa perencanaan intervensi sosial, termasuk penyusunan menu makanan, harus mempertimbangkan kondisi fungsional dan kesehatan fisik lansia. WHO (2015) juga menegaskan bahwa pelayanan lansia yang efektif harus menggunakan pendekatan *person-centered care*, termasuk asesmen individual.

Pada aspek **pengorganisasian (organizing)**, struktur organisasi telah dibentuk secara formal melalui Surat Keputusan Camat, dengan pengurus inti terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tugas pokok dan fungsi telah dibagi secara proporsional sesuai dengan kompetensi masing-masing, serta mencerminkan prinsip **task specialization** dalam teori George R. Terry (Terry, 2009). Ketua Pokmas memiliki peran sentral dalam menjamin kelancaran operasional dan keselamatan anggota, sementara anggota lainnya bertugas mulai dari memasak hingga distribusi makanan. Namun demikian, belum terdapat standar formal mengenai kriteria atau seleksi petugas Pokmas. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kualitas dan kontinuitas pelayanan. Nugroho (2011) menekankan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan melalui penyusunan standar dan pedoman pelaksanaan kerja, khususnya dalam program berbasis komunitas.

Aspek **pelaksanaan (actuating)**. Kegiatan distribusi bantuan permakanan dilakukan secara efektif berdasarkan alur teknis yang sistematis. Pokmas melaksanakan distribusi sesuai jadwal, mekanisme teknis, dan didukung dengan sarana distribusi yang memadai sehingga makanan sampai tepat waktu dan dalam kondisi layak konsumsi. Pelaksanaan ini sesuai dengan *Permensos No. 1 Tahun 2019* serta *Petunjuk Teknis ATENSI Lansia* (Kementerian Sosial RI, 2022).

Namun, pelaksanaan belum didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) teknis dan SOP Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Ketiadaan SOP ini menjadi kelemahan serius, terutama karena distribusi dilakukan di medan yang berat seperti jalan rusak dan cuaca ekstrem. Prabowo (2016) menegaskan bahwa SOP diperlukan untuk menjamin standar mutu layanan dan keselamatan kerja dalam program pelayanan sosial. Selain itu, menurut ILO (2020), SOP K3 penting untuk melindungi pekerja dan relawan dari risiko kerja lapangan.

Pada aspek **pengendalian (controlling)**, Monitoring dan evaluasi telah dilakukan, namun masih bersifat informal tanpa instrumen dan indikator baku sebagai tolok ukur pengawasan yang objektif. Proses evaluasi yang hanya bertumpu pada penilaian subjektif dari pelaksana lapangan tidak sejalan dengan prinsip pengendalian dalam teori Terry (2009), yang menekankan pentingnya penetapan standar, pengukuran kinerja aktual, perbandingan hasil, dan tindakan korektif.

Kementerian PANRB (2019) juga menekankan bahwa pengawasan dan evaluasi program sosial harus berbasis data, indikator terukur, dan terdokumentasi secara sistematis agar dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan.

Analisis Masalah dan Rekomendasi Solusi. Analisis menunjukkan bahwa pengelolaan program permakanan belum berjalan optimal. Permasalahan kunci mencakup: (1) Tidak adanya asesmen kebutuhan lansia secara menyeluruh; (2) Tidak ada standar formal penetapan petugas Pokmas; (3) Ketiadaan SOP teknis dan K3, serta (4) Sistem controlling yang lemah tanpa indikator dan dokumentasi baku.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, perlu dilakukan penyusunan format asesmen lansia yang mempertimbangkan identitas, fungsionalitas, kondisi fisik, psikososial, dan dukungan keluarga (Ma'arifatul, 2011; WHO, 2015). Standarisasi Pokmas juga penting agar struktur organisasi lebih akuntabel (Nugroho, 2011). Selain itu, penyusunan SOP pelaksanaan dan SOP K3 diperlukan untuk menjamin keselamatan dan mutu layanan (ILO, 2020; Prabowo, 2016). Terakhir, controlling perlu berbasis data, indikator, dan sistem evaluasi yang terdokumentasi (Kementerian PANRB, 2019).

Dalam **analisis sistem sumber**, keberhasilan optimalisasi pengelolaan program juga dipengaruhi oleh pemanfaatan sistem sumber yang terbagi menjadi tiga: (1) **Sumber formal**: Dinas Sosial, Kecamatan, Puskesmas, dan pendamping PKH, yang menyediakan regulasi dan dukungan teknis (Kementerian Sosial RI, 2022); (2) **Sumber informal**: Keluarga dan masyarakat sekitar yang berperan melalui dukungan sukarela dan solidaritas sosial (Suharto, 2014); (3) **Sumber kemasyarakatan**: Lembaga sosial, LSM, dan instansi pusat yang berkontribusi dalam bantuan, pembinaan, dan penguatan layanan (Midgley, 2014). Midgley (2014) menekankan pentingnya *social development* berbasis sinergi antar aktor formal dan nonformal untuk mencapai keberlanjutan program sosial.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng telah berjalan secara fungsional berdasarkan empat fungsi manajemen George R. Terry. Proses perencanaan dilakukan secara sistematis dan partisipatif, namun belum dilandasi oleh asesmen kebutuhan individual lansia. Struktur organisasi Pokmas telah dibentuk secara formal, namun belum didukung oleh standar rekrutmen dan pelatihan yang memadai. Pelaksanaan program menunjukkan efektivitas distribusi, tetapi tidak dilengkapi dengan SOP teknis dan keselamatan kerja, sehingga menimbulkan potensi risiko bagi

petugas. Aspek pengendalian program dilaksanakan secara informal tanpa indikator baku, yang menyulitkan pengukuran efektivitas program secara objektif.

Untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan program, direkomendasikan penyusunan format asesmen lansia, standarisasi kriteria keanggotaan Pokmas, penyusunan SOP teknis dan K3, serta pembangunan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data. Keterbatasan penelitian ini terletak pada wilayah studi yang hanya mencakup satu desa. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak wilayah dan pemangku kepentingan

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2016). *The Social Protection Indicator: Assessing Results for Asia*. Asian Development Bank.
- Akbar. 2021. "Pelatihan Dan Pendampingan Kader Posyandu Lansia Di Kecamatan Wonomulyo." *Jurnal Abdidas* 2(2): 392–97.
- Amalia Yunia Rahmawati. 2019. "Pelaksanaan Program Pelatihan Keterampilan Menjahit Di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) Yogyakarta." : *Jurnal Fesyen: Pendidikan dan Teknologi*, 8(1).
- Anjelita, T. 2024. Implementasi Program Bantuan Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Desa Awilega, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang. (Skripsi, Prodi Peksos, Poltekesos:Bandung). Diakses dari perpustakaan Poltekesos Bandung.
- Arlianty, L. S., & Jubaedah, Y. (2015). Analisis Relevansi Program Dan Pelaksanaan Pelayanan Lansia di Balai Perlindungan Sosial Tresna Werdha Ciparay Bandung. *FamilyEdu: Jurnal Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 1(1).
- Asaduzzaman. (2020). Teori Tata Kelola dan Pengelolaan. Dalam Tinjauan Pustaka (hal.10-12) Universitas Diponegoro. Diakses dari <https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/14915/3/BAB%20II.pdf>.
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Profil Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: BKKBN.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Statistik penduduk lanjutusia. Badan Pusat Statistik.
<https://www.bps.go.id/id/publication/2022/12/27/3752fd1d9b41aa69be4c65c/statistik-penduduk-lanjut-usia-2022.html>
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. (2021). *Profil Penduduk Lanjut Usia*. Jakarta: BKKBN.
- Bowen, T., Del Ninno, C., Andrews, C., Coll-Black, S., Johnson, K., Kawasoe, Y., & Williams, A. (2020). *Adaptive social protection: building resilience to shocks*. World Bank Publications.
- Crawford, Karin, and Janet Walker. "Pekerjaan Sosial dengan Kelompok Lanjut Usia." Bandung: STKS Bandung (2012).
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dari, W., & Irfan, M. (2023). *Active Aging dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lanjut Usia*. Share: Social Work Journal, 13(1), 102-110.
- Delima, Haryani. (2024). Evaluasi implementasi program permakanan lanjut usia keluarga tunggal di Kota X. *Jurnal Sosial dan Kesejahteraan*, 10(1), 55–66.
- Destriande, I. M., Faridah, I., Oktania, K., & Rahman, S. (2021). Faktor yang mempengaruhi kualitas hidup pada lanjut usia. *Jurnal Psikologi Wijaya Putra (Psikowipa)*, 2(1), 1-9.
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36.
- Amalia, N., Susilowati, E., & Andayani, R. (2021). Kondisi Psikososial Anak dalam Pengasuhan Alternatif di PSAA Putra Utama 3 Ceger Cipayung Jakarta Timur. *Jurnal Pusdiklat Kesos*.
- Haecal, M. I. F. (2023). The Meaning of al-Hikmah in the Tafsir of Surah Luqman Verse 12: A Comparative Analysis Study of Tafsir Nusantara by Bisri Mustafa and Quraish Shihab. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan ...*. <http://journal.iaincurup.ac.id/index.php/JF/article/view/6542>
- Haecal, M. I. F., & Rusmana, D. (2022a). Historical Conception According To The Natural Malay Tafsir of Turjuman al-Mustafad: a Tafsir Study of The Nusantara. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum*, 22(1), 78–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/al-risalah.vi.28360>
- Haecal, M. I. F., & Rusmana, D. (2022b). Historical Conception According To The Natural Malay Tafsir Of Turjuman Al-Mustafad: A Tafsir Study Of The Nusantara. *Al-Risalah Jurnal Ilmu* https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_risalah/article/view/28360
- Izzan, A., & Haecal, M. I. F. (2024). Local Wisdom in Malay Natural Interpretation "Turjuman Al-Mustafid": Analysis of Surah Al-Baqarah with a Historical Approach. *AlBayan*, 22(2), 216–238. <https://doi.org/10.1163/22321969-20240151>
- Mohammad Irfan Farraz Haecal. (2022). DAKWAH RAHMAT LIL AL-ALAMIN AS SOLUTIVE DA'WAH: A STUDY OF THE STUDY OF TAFSIR SCIENCE WITH THE APPROACH OF SHARAH HADITH. *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies*, 9(2), 102–119. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181103182540-32-343764/ustaz-abdul-somad-bahas->

- Soelton, M., Apriani, F., Wahyono, T., Arief, H., & ... (2021). Conceptualizing the role of organizational performance and good corporate governance in Social Welfare Institutions Banten–Indonesia. ... *Journal of Innovative* ... https://www.researchgate.net/profile/Ellya-Susilowati/publication/350957821_Conceptualizing_the_Role_of_Organizational_Performance_and_Good_Corporate_Governance_in_Social_Welfare_Institutions_Banten_-_Indonesia/links/607c43cf8ea909241e0b58a0/Conceptualizing-the-Role-of-Organizational-Performance-and-Good-Corporate-Governance-in-Social-Welfare-Institutions-Banten-Indonesia.pdf
- Susilowati, E. (2013). *Wanita yang mempunyai HIV/AIDS dan pasangan suami yang menyuntik dadah di Bandung, Indonesia*. eprints.usm.my. http://eprints.usm.my/43580/1/Ellya_Susilowati24.pdf
- Susilowati, E. (2018a). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict with Law in Indonesia. *Asian Social Work Journal*. <http://msocialwork.com/index.php/aswj/article/view/51>
- Susilowati, E. (2018b). Knowledge and Skills of Social Workers in Handling Children in Conflict with Law in Indonesia. *Asian Social Work Journal*, 3(4), 1–12. www.msocialwork.com
- Halawa, RYEJ. 2021. Literature Review: Dukungan Keluarga Dengan Peningkatan Kualitas Hidup Lansia Dalam Pemenuhan Kebutuhan Aktivitas Sehari-hari. <http://ecampus.poltekkes-medan.ac.id/xmlui/handle/123456789/4607>.
- HelpAge International. (2013). *Ageing in the Twenty-First Century: A Celebration and A Challenge*. London: United Nations Population Fund.
- International Labour Organization. (2020). *World Social Protection Report 2020–22: Social protection at the crossroads – in pursuit of a better future*. Geneva: ILO.
- International Labour Organization. (2017). *World Social Protection Report 2017–19: Universal Social Protection to Achieve the Sustainable Development Goals*. Geneva: ILO
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2021). *Pedoman Gizi Seimbang untuk Lansia*. Jakarta: Direktorat Gizi Masyarakat.
- Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2022). *Pedoman Pelaksanaan Program Permakanaan Bagi Lansia*. Jakarta: Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Keputusan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 203/4/HK.01/01/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Permakanaan bagi Lansia Keluarga Tunggal
- Kidd, S., Gelders, B., Rahayu, S. K., Larasati, D., Huda, K., & Siyaranamual, M. (2018). *Perlindungan Sosial bagi Penduduk Lanjut Usia di Indonesia*. TNP2K. Jakarta.
- Kurniawan, F., & Tambunan, E. T. (2023). Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lkslu) Yayasan Sinar Agape Dalam Meningkatkan Kualitas Hidup Lansia. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 17(1), 16-24.
- L.J Moleong. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*.
- Ma'arifatul, L. (2011). *Keperawatan Lanjut Usia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Midgley, J. (2014). *Social Development: Theory and Practice*. London: SAGE Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Netting, F. E., Kettner, P. M., McMurtry, S. L., & Thomas, M. L. (2017). *Community Practice: Theories and Skills for Social Workers* (3rd ed.). Boston: Pearson.
- Nugroho. 2000. *Keperawatan Gerontik*. EGC. Jakarta. 1,18-20,27,29,116.
- OECD. (2019). *Social Protection System Review of Indonesia*. OECD. <https://doi.org/10.1787/788e9d71-en>
- Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Operasional Asistensi Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
- Prabowo, R. (2016). Urgensi penyusunan SOP dan K3 dalam pelayanan sosial. *Jurnal Kesos*, 4(2), 101–115.
- Purba, D., Simanjuntak, R., & Lestari, A. (2020). Evaluasi kualitas layanan program permakanaan lansia: Studi di wilayah perkotaan. *Jurnal Pelayanan Sosial*, 7(2), 101–112.
- Putri, A. M. (2022). *Peran Dinas Sosial Dalam Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) Terlantar Di Kota Tangerang Selatan (Bachelor's thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta)*.
- Rahmawati, N. (2025). Evaluasi Program Permakanaan di Kecamatan Pabuaran. *Jurnal Pembangunan Sosial*, 5(1), 35–49.
- Rohimat, T. (2025). Implementasi Program Permakanaan di Kecamatan Paseh Berdasarkan Teori Meter dan Horn. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 12(1), 22–34.
- Septiana, M. (2023). Tantangan implementasi program bantuan permakanaan bagi lansia keluarga tunggal di wilayah pedesaan. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 15(3), 177–189.
- Septiana, R. (2014). Implementasi Program Pemberian Permakanaan Bagi Lanjut Usia Sangat Miskin Dan Lanjut Usia Terlantar Di Kelurahan Airlangga Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Publika*, 2(2).

*Pengelolaan Program Bantuan Permakanan bagi Lanjut Usia
Keluarga Tunggal di Desa Bojongkoneng Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat*

- Suharto, E. (2014). *Kebijakan Sosial: Sebagai Respons terhadap Masalah dan Agenda Kesejahteraan Sosial*. Bandung: Alfabeta.
- Susilowati, E. (2019). Penerapan Teknologi Pengembangan Masyarakat pada Program Desa Sabilulungan. *Jurnal Ilmiah Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial (Lindayasos)*, 1(1).
- Tadung, Frieska Putrima, Merry Regina Mamuko, and Remalia Putri Matsino. 2022. "Pendampingan Pastoral Bagi Kaum Lansia Di Panti Werda Damai Ronomuut." *POIMEN Jurnal Pastoral Konseling* 3(2): 26–43.
- Terry, G. R. (2009). *Human Service Organization Management*. New York: McGraw-Hill.
- Turohma, N., Pramudyasmono, H. G., & Himawati, I. P. (2024). Upaya bertahan hidup lansia terlantar di kota Bengkulu. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(2), 244-250.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
- Yumna, D. R. U., Ayu, R. S., Dewi, A., Putri, N. F., & Ridwan, R. (2024). Analisis Kebijakan Program Keluarga Harapan Dalam Memutus Kemiskinan Di Indonesia. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(7), 5.
- World Health Organization. (2015). *World report on ageing and health*. Geneva: World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789241565042>
- Zulfirman, Rony. 2022. "Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan." *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran: JPPP* 3(2): 147–53.